Halaman

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM xiii

PROLOG
Problem Kelembagaan Negara Republik Indonesia 1

BAB I
BASIS ARGUMENTASI TEORITIK EKSISTENSI KOMISI-KOMISI NEGARA 13
A. Perspektif teoritik dan pentingnya bernegara bangsa indonesia 17
B. Alat Perlengkapan Negara dalam Perspektif Teoritik 25
1. Teori Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan. 33
2. Susunan dan Kedudukan Komisi-Komisi Negara 34
3. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi-Komisi Negara. 37
4. Sistem Ketatanegaraan 41
C. Teori Kewenangan Konstitusional Komisi-Komisi Negara 45
1. Wewenang Kelembagaan Negara 48
2. Dasar Wewenang Kelembagaan Negara 56
3. Sumber Wewenang Kelembagaan Negara 61

BAB II
EKSISTENSI KOMISI NEGARA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 67
A. Esensi Komisi Negara Dalam Perspektif Bernegara Bangsa Indonesia. 67
1. Esensi Komisi Negara Ditinjau dari Sifat Hakikat Negara Republik Indonesia 69
2. Esensi Komisi Negara Ditinjau dari Pembenaran Negara Republik Indonesia 73
3. Esensi Komisi Negara Ditinjau dari Tujuan Negara Republik Indonesia. 75
4. Esensi Komisi Negara Ditinjau dari Terjadinya Negara Republik Indonesia. 79
5. Esensi Komisi Negara Ditinjau dari Tipe Utama Negara Republik Indonesia. 80
6. Tujuan Dasar Pembentukan Komisi Negara. 82
B. Parameter Bernegara Bangsa Indonesia dan Cita Negara Pancasila 89
1. Menurut Paham Konstitusionalisme Indonesia. 92
2. Menurut Paham Negara Hukum Republik Indonesia 101
3. Menurut Paham Demokrasi Pancasila. 110
C. Eksistensi Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Alat Perlengkapan Negara. 123
1. Kelembagaan Negara Yang Berpijak Pada Eksistensi Komisi Negara. 128
a. Pergeseran Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan. 130
b. Pembaharuan Kelembagaan Negara. 135
2. Kualifikasi Dari Eksistensi Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara. 139
a. Berdasarkan Sumber Kewenangan Kelembagaan Negara 147

b. Berdasarkan Fungsi, Wewenang dan Tugas Kelembagaan Negara. 145

BAB III
PELEMBAGAAN KOMISI NEGARA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 155
A. Pelembagaan Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara 155
1. Pelembagaan Komisi Negara Menurut Doktrin Ahli Hukum 158
2. Pelembagaan Komisi Negara Menurut UUD 1945. ... 169
B. Pelembagaan Komisi Negara Sebagai Lembaga Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia. ... 178
1. Pelembagaan Komisi Negara dari Segi Sumber Kewenangannya. 190
a. Pembentukan Organ Negara Melalui UUD 1945. ... 192
b. Pembentukan Organ Negara Melalui Undang-Undang. 194
c. Pembentukan Organ Negara Melalui Keputusan Presiden. 195
2. Pelembagaan Komisi Negara dari Segi Fungsi Kelembagaannya. 198
a. Komisi Negara Sebagai Organ Negara Yang Fungsinya Pendukung Bidang Pengawasan. 206
b. Komisi Negara Sebagai Organ Negara Yang Fungsinya Pendukung Bidang Administrasi. 210
c. Komisi Negara Sebagai Organ Negara Yang Fungsinya Pendukung Bidang Audit. 213
3. Pengelompokan (*Grouping*) Komisi-Komisi Negara 219

BAB IV
IMPLIKASI DARI EKSISTENSI KOMISI NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERNEGARA 225
A. Implikasi Hukum Dari Eksistensi Komisi Negara. 225
1. Kriteria Kelembagaan Negara. 229
2. Penataan Sistem Hukum Nasional. 236
B. Implikasi Politik Dari Eksistensi Komisi Negara. 245
1. Desain Kelembagaan Negara sebagai Instrumen Demokrasi. 247
2. Konflik Kekuasaan Pemerintahan. 251
C. Sengketa Kewenangan Komisi Negara. 253
1. Sengketa Kewenangan Konstitusional. 256
2. Sengketa Kewenangan Kelembagaan 261
3. Sengketa Kewenangan Administrasi Negara. 264
D. Paradigma Baru Atas Eksistensi Komisi Negara 264
1. Eksistensi Komisi Negara Dalam Dinamika Konsep Bernegara. 273
2. Eksistensi Komisi Negara Dalam Dinamika Konsep *Civil Society*. 285
3. Pola Hubungan Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia 295
4. Mekanisme Pelembagaan Dalam Kehidupan Bernegara 300
5. Fungsi Utama Komisi Negara Dalam Negara Hukum Yang Demokratis. 302

DAFTAR PUSTAKA 309

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Makna Dari Hakekat Negara Republik Indonesia 84
Tabel 2.2 : Beberapa Komisi Negara dengan Uraian Tugasnya di Inggris. 82
Tabel 2.3 : Prinsip-Prinsip Dasar yang Harus Diperhatikan Dalam Pembentukan Lembaga-Lembaga Baru Di Indonesia. 141
Tabel 2.4 : Tingkatan Kelembagaan Berdasarkan Sumber Kewenangan Serta Pengaturan Selanjutnya. 143
Tabel 2.5 : Pengertian Pemerintahan dari Sudut Pandang Fungsi Dan Organisasi 147
Tabel 2.6 : Kandungan Arti Pemerintahan Sebagai Institusi/Organisasi. 148
Tabel 2.7 : Hasil Analisis Eksistensi Komisi Negara Untuk Dapat Dikualifikasi Sebagai Lembaga Negara .. 154
Tabel 3.1 : Pengertian Lembaga Berdasarkan Tujuan Pembentukannya 156
Tabel 3.2 : Pengertian Lembaga Berdasarkan Proses Pembentukannya 156
Tabel 3.3 : Istilah Lembaga Di Dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan. 157
Tabel 3.4 : Kategori Lembaga Negara Dalam Pengertian Dan Kriterianya. 161
Tabel 3.5 : Klasifikasi Lembaga Negara Berdasarkan Fungsi Negara Setelah Perubahan UUD 1945 ... 170
Tabel 3.6 : Lembaga Negara Penunjang Demokrasi Konstitusional *(State Institutions Supporting Constitutional Democracy)* Dalam Konstitusi Afrika Selatan. 174
Tabel 3.7 : Istilah Lembaga Negara Dalam UUD 1945 Setelah Perubahan 176

Tabel 3.8 : Penafsiran Yuridis Atas Istilah Lembaga Negara Oleh MK.(Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945) 182
Tabel 3.9 : Lembaga Yang Disebut Dalam UUD 1945 Setelah Perubahan. 192
Tabel 3.10 : Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Perintah dan Kewenangannya Diberikan Secara Langsung Oleh UUD 1945. 193
Tabel 3.11 : Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Perintah UUD 1945, Namun Kewenangannya Tidak Disebut Secara Langsung (*Implisit*). 194
Tabel 3.12 : Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Melalui Undang-Undang. 195
Tabel 3.13 : Dewan Yang Dibentuk Melalui Keputusan Presiden. 196
Tabel 3.14 : Lembaga Non Departemen Yang Dibentuk Melalui Keputusan Presiden. 197
Tabel 3.15 : Lembaga Negara Dengan Fungsi Utama/Pokok. 198
Tabel 3.16 : Lembaga Negara Dengan Fungsi Penunjang/Pendukung. 199
Tabel 3.17 : Lembaga Pendukung / Penunjang Yang Memiliki *Constitutional Importance*. 199
Tabel3.18 : Lembaga Penunjang Yang Fungsi Dan Kewenangannya Ditentukan Berdasarkan Undang-Undang. 200
Tabel 3.19 : Hasil Analisis Pelembagaan Komisi Negara 223
Tabel 4.1 : Dua Aspek Pembatasan Penggunaan Kekuasaan 231
Tabel 4.2 : Ketentuan Mengenai Sengketa Kewenangan Konstitusional Menurut Mahkamah Konstitusi 257
Tabel 4.3 : Kedudukan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Di Mahkamah Konstitusi 258
Tabel 44 : Hasil Analisis Implikasi Dari Eksistensi Komisi Negara 268
Tabel 4.5 : Konsep Civil Society Dalam Beberapa Pengertian 292
Tabel 4.6 : Temuan Hasil 301

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Korelasi Antara Organ Negara dengan Tujuan Negara dan Konstitusi 32
Gambar 1.2 : Target Utama Organisasi Negara Melalui Organ-Organ Negara. 33
Gambar 1.3 : Fungsi Ekskutif Dengan Organ-Organnya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Negara 39
Gambar 2.1 : Esensi Komisi Negara Sebagai Hasil Komunikasi Perkembangan Bernegara Bangsa Indonesia. 72
Gambar 2.2 : Trias Politica Murni 127
Gambar 2.3 : Distribusi Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan UUD 1945 128

Gambar 3.1 : Hierarki Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945 164
Gambar 4.1 : Tahapan Penyelesaian Sengketa Dalam Putusan KPPU 262